

**SKRIPSI**

**PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA MELALUI AKSESIBILITAS PASAR  
RAYA KOTA PADANG BAGI PENYANDANG DISABILITAS**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

**REYHAN HAVITRA**  
**1910113123**

**Program Kekhususan : Hukum Tata Negara (PK V)**



**Pembimbing :**

**Yunita Syofyan, S.H., M.H**  
**Henny Andriani, S.H., M.H**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2025**

**No.Reg : 10/PK-V/II/2025**

## ABSTRAK

Penyandang disabilitas sebagai salah satu kelompok yang menghadapi masalah dalam kesejahteraan sosial, perlu mendapatkan perhatian agar mereka dapat menjalankan peran sosialnya. Penyandang disabilitas seringkali mengalami kesulitan dalam menjalankan aktivitas mereka, terutama dalam hal mobilitas, yang menyebabkan mereka mengalami hambatan fisik dalam bergerak secara optimal jika dibandingkan dengan individu yang tidak memiliki disabilitas. Selain itu, secara psikologis, mereka mungkin merasa rendah diri dan menghadapi kesulitan dalam beradaptasi dengan masyarakat karena seringkali menerima perlakuan berupa celaan atau simpati yang merendahkan saat dilihat oleh orang lain. Sebagai warga negara, Penyandang disabilitas memiliki hak untuk mengakses ruang publik dan memanfaatkan fasilitasnya. Salah satu langkah awal yang dapat diambil oleh pemerintah adalah melibatkan masyarakat difabel dalam seluruh proses perumusan konsep hingga tahap akhir pembangunan infrastruktur publik. Dengan demikian, diharapkan tidak akan ada lagi warga negara yang hanya menjadi penonton dalam pembangunan infrastruktur publik yang tidak memiliki akses yang layak. Pada penelitian ini, rumusan masalah yang *Pertama* adalah bagaimana pemenuhan Hak Asasi Manusia terhadap penyandang disabilitas, *Kedua*, bagaimana pelaksanaan jaminan perlindungan aksesibilitas terhadap penyandang disabilitas di pasar raya kota padang. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis empiris, yaitu pendekatan berdasarkan penelitian lapangan yang dilakukan dengan metode wawancara semi terstruktur dengan Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang dan Ketua DPD Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia Sumatera Barat. Penelitian ini menggunakan sifat deskriptif kualitatif dan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan bahwa *Pertama*, penyandang disabilitas memiliki posisi, hak, dan tanggung jawab yang setara dengan masyarakat lainnya dan juga merupakan warga negara yang berhak mendapatkan perlakuan dan perlindungan khusus guna melindungi mereka dari tindakan diskriminasi yang terutama, melindungi Hak Asasi Manusia mereka. *Kedua*, dalam perencanaan pembangunan sebuah infrastruktur khususnya di Pasar Raya Kota Padang yang akan digunakan oleh masyarakat khususnya penyandang disabilitas tersebut harus adanya koordinasi atau melibatkan masyarakat penyandang disabilitas dalam seluruh proses perumusan konsep hingga tahap akhir pembangunan infrastruktur publik yang mana dengan harapan tidak akan ada lagi warga negara yang hanya menjadi penonton dalam pembangunan infrastruktur publik yang tidak memiliki akses yang layak.